

KETERKAITAN MIGRASI PENDUDUK DAN PEREKONOMIAN DI JAWA TENGAH

THE RELATIONSHIP OF POPULATION MIGRATION AND ECONOMY IN CENTRAL JAVA

Reny Yesiana, Wiwandari Handayani, Renni Nur Hayati

Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

reny.yesiana@pwk.undip.ac.id, wiwandari.handayani@undip.ac.id, reeni@gmail.com

Diterima: 21 April 2015, Direvisi: 8 Mei 2015, Disetujui: 21 Mei 2015

ABSTRAK

Dinamika kependudukan menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam perencanaan wilayah. Kependudukan penting untuk diperhatikan dan menjadi bahan pertimbangan dikarenakan penduduk merupakan subjek sekaligus objek pembangunan guna mencapai kesejahteraan. Migrasi merupakan salah satu dari tiga faktor dasar yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, selain kelahiran (fertilitas) dan kematian (mortalitas). Migrasi dapat meningkatkan jumlah penduduk apabila jumlah penduduk yang masuk ke suatu wilayah lebih banyak daripada jumlah penduduk yang meninggalkan wilayah tersebut. Penelitian ini mengkaji lebih dalam dinamika migrasi penduduk yang terjadi di Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif kualitatif dan analisis overlay peta. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan bahwa sebagian besar kabupaten/ kota di Jawa Tengah termasuk dalam kuadran III sebanyak 21 kabupaten/ kota (60%) dan pada kuadran I sebanyak 11 kabupaten/kota (31%). Sedangkan yang termasuk kategori kuadran II hanya 1 kabupaten (3%) dan kuadran IV hanya 2 kabupaten (6%).

Kata kunci: penduduk, migrasi, ekonomi, Jawa Tengah

ABSTRACT

Population dynamics is one of the aspects be considered in regional planning. Population important to be noticed and taken into consideration because the population is subject and object of development in order to achieve prosperity. Migration is one of the three basic factors that influence the growth of the population, in addition to births (fertility) and death (mortality). Migration can increase the number of population if the number of people who go into an area more than the number of people who leave the region. This study examines the deeper dynamics of migration that occurred in Central Java. This study used a qualitative descriptive statistical analysis and map overlay analysis. Based on the results of studies that have been done that most region/ cities in Central Java included in quadrant III as many as 21 region/ cities (60%) and in quadrant I, as many as 11 region/ cities (31%). While the category quadrant II is only one region(3%) and quadrant IV only 2 region (6%).

Keyword: population, migration, economiec, Central Java

PENDAHULUAN

Perkembangan suatu wilayah dipengaruhi oleh berbagai macam aspek, baik

dari aspek sosial, ekonomi, maupun fisik alam yang dimiliki. Kependudukan merupakan salah satu aspek sosial yang

mempengaruhi pembangunan. Hal ini dikarenakan penduduk merupakan subjek dan objek pembangunan dimana perencanaan yang disusun mengarah pada kesejahteraan penduduk tersebut. Berdasarkan data PBB (2014), jumlah penduduk Indonesia menempati peringkat ke-4 di dunia dan peringkat ke-3 di Asia. Sensus penduduk yang telah dilakukan BPS (2010) menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia sebesar 237,6 juta jiwa atau bertambah 32,5 juta jiwa dari tahun 2000. Hal ini menunjukkan bahwa selama satu dekade terakhir, pertumbuhan penduduk di Indonesia sebesar 1,49 persen per tahun. Jumlah itu meningkat dibandingkan dengan laju pertumbuhan satu dekade sebelumnya (1990-2000) sekitar 1,44 persen per tahun. Tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia saat ini masih tinggi dengan persebaran dan pertumbuhan penduduk yang berbeda di setiap provinsi. Berdasarkan hasil rekap e-KTP dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2013), Provinsi Jawa Tengah dalam konteks nasional menempati peringkat ke-3 dalam persebaran penduduk terbanyak setelah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur, yaitu sebesar 34.798.486 jiwa atau 14 persen dari total penduduk Indonesia. Pertumbuhan selama satu dekade terakhir (2000-2010) sebesar 0,37 persen lebih rendah dari pertumbuhan nasional penduduk nasional (1,49 persen).

Menurut Munir (dalam Adioetomo dan Samosir, 2011), migrasi merupakan salah satu dari tiga faktor dasar yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, selain kelahiran (fertilitas) dan kematian (mortalitas). Migrasi dapat meningkatkan jumlah penduduk apabila jumlah penduduk yang masuk ke suatu wilayah lebih banyak daripada jumlah penduduk yang meninggalkan wilayah tersebut. Sebaliknya, migrasi dapat mengurangi jumlah penduduk apabila penduduk yang masuk

ke suatu wilayah lebih sedikit. Migrasi di negara berkembang erat kaitannya dengan urbanisasi. Seperti yang dikemukakan Drakakis-Smith (2000), bahwa urbanisasi di negara berkembang merupakan efek dari peningkatan angka kelahiran dan proses migrasi. Ketersediaan infrastruktur di perkotaan akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan dan juga menjadi faktor pendorong bagi masyarakat desa untuk bermigrasi di kawasan perkotaan. Pacione (2001) mengemukakan bahwa urbanisasi yang terjadi di negara berkembang terjadi pada negara-negara yang memiliki perkembangan ekonomi rendah dan migrasi terjadi secara besar-besaran, sehingga laju urbanisasi semakin tinggi. Oleh karena itu, migrasi sangat berpengaruh terhadap pola urbanisasi yang terjadi di negara berkembang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena proses perpindahan penduduk tersebut diklasifikasikan menjadi faktor pendorong dan faktor penarik (Adioetomo dan Samosir, 2011). Faktor pendorong ini lebih kepada faktor-faktor yang dimiliki wilayah asal yang menyebabkan penduduk meninggalkan daerah asalnya. Faktor-faktor pendorong tersebut misalnya kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya fasilitas pelayanan publik, kurangnya sarana-prasana, dan menurunnya sumber daya alam yang dimiliki wilayah tersebut. Adapun faktor penarik merupakan faktor-faktor yang menyebabkan penduduk melakukan perpindahan ke daerah tujuan, seperti tersedianya lapangan pekerjaan, kelengkapan sarana prasarana, ketersediaan fasilitas pelayanan publik yang baik, dan sebagainya. Sementara Lee (1970) membedakan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi menjadi empat bagian, yaitu faktor-faktor yang terdapat di daerah asal, faktor-faktor yang terdapat di daerah tujuan, penghalang antara dan faktor individu. Penghalang antara tersebut

adalah bukan hanya dalam artian fisik saja tetapi juga faktor biaya untuk berpindah.

Aktivitas migrasi yang berlangsung dari suatu wilayah ke wilayah tertentu merupakan imbas positif yang berkembang sebagai konsekuensi pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan Haris (2002). Makin baik perkembangan ekonomi suatu wilayah maka kemungkinan terjadinya perkembangan volume migrasi akan semakin tinggi. Sebagai contoh migrasi yang terjadi di Provinsi Bali selama periode 1980-1990 mengalami kenaikan dengan daerah asal migran yang menonjol dari Jawa Timur. Menurut Sudibia (2011), faktor-faktor yang mempengaruhi migran yang masuk ke Provinsi Bali dari Provinsi Jawa Timur, yaitu jarak yang relatif dekat, tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang relatif memadai, serta adanya ketimpangan ekonomi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi suatu wilayah telah mempengaruhi seseorang untuk melakukan aktivitas migrasi, sehingga variabel ekonomi ini bisa menjadi salah satu bagian yang dikaitkan dengan intensitas migrasi. Keterkaitan kedua variabel tersebut akan dikaji di Provinsi Jawa Tengah yang hasilnya berupa tipologi migrasi penduduk dan ekonomi wilayah Jawa Tengah.

Tulisan ini terbagi menjadi empat bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang dan tujuan penulisan, bagian kedua menjelaskan lingkup wilayah dan metoda, bagian ketiga menguraikan hasil analisis dan pembahasan yang meliputi perkembangan migrasi penduduk dan ekonomi wilayah Provinsi Jawa Tengah serta tipologi wilayah berdasarkan rata-rata migrasi serta ekonomi selama kurun waktu 10 tahun (satu dekade). Pada bagian keempat adalah penutup yang berisi kesimpulan hasil kajian.

METODE PENELITIAN

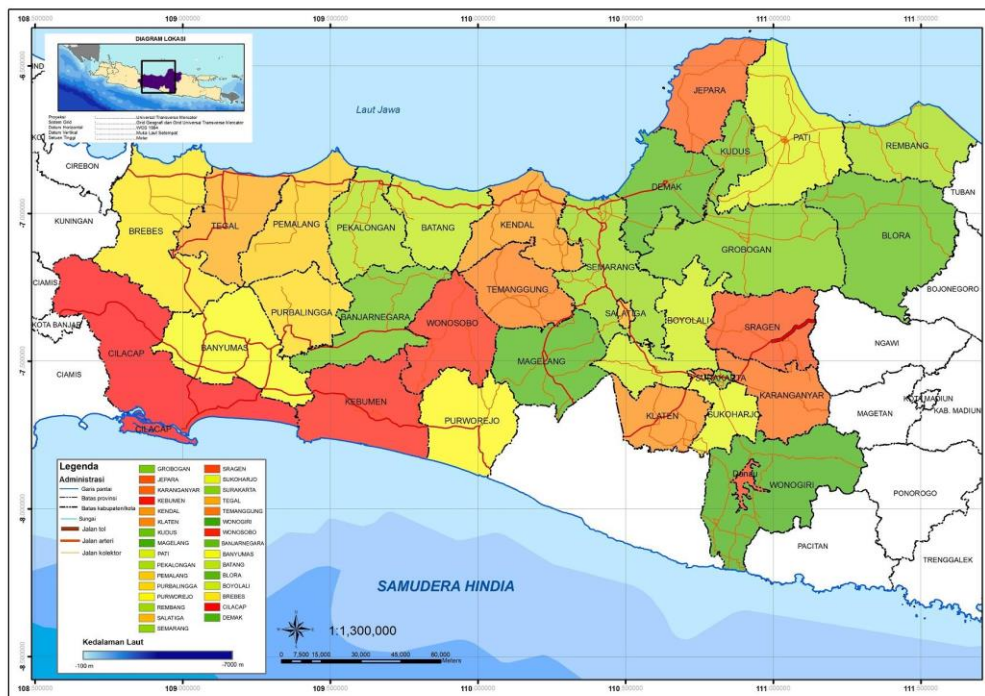
Wilayah kajian pada pembahasan ini adalah Provinsi Jawa Tengah. Kajian dilakukan terhadap data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah selama kurun waktu 10 tahun (2001-2011). Analisis dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif dengan membuat tipologi antara rata-rata jumlah migrasi dan perekonomian (rata-rata nilai PDRB) serta analisis spasialnya menggunakan metode Sistem Informasi Geografis (GIS).

Data yang dibutuhkan untuk kajian ini adalah data migrasi dan PDRB. Menurut BPS, migrasi adalah perpindahan penduduk antarwilayah yang meliputi antardesa, antarkecamatan, antarkabupaten dan antarprovinsi. Data migrasi ini terdiri atas migrasi masuk dan keluar. Namun berdasarkan cara pengumpulannya, terdapat beberapa perbedaan pada masing-masing level, yaitu:

1. Data migrasi desa diperoleh dengan cara pendataan masing-masing desa dari penduduk yang mengajukan surat pindah ke desa lain.
2. Data migrasi kecamatan diperoleh dari rekapan antardesa.
3. Data migrasi kabupaten diperoleh dari isian online yang berada di Kecamatan.

Dan pada kenyataannya, hasil dari rekapitulasi data migrasi masuk dan keluar dari kecamatan dalam angka dan kabupaten dalam angka sebagian terdapat perbedaan.

Pada penelitian ini, data migrasi yang digunakan merupakan penjumlahan dari data migrasi unit desa, namun pada sebagian desa yang tidak memiliki data migrasi, data tersebut diambilkan dari unit kabupaten atau penjumlahan unit kecamatan. Sedangkan untuk data PDRB merupakan data pada unit kabupaten/kota yang dirinci per sektor.



Gambar 1 Peta Provinsi Jawa Tengah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Klasifikasi Rata-rata Migrasi Masuk di Jawa Tengah

Pembagian klasifikasi pada pembahasan ini berdasarkan pada rata-rata jumlah migrasi. Selama 10 tahun, rata-rata migrasi masuk di Jawa Tengah sebesar 6.978 jiwa. Dengan dasar tersebut, klasifikasi dapat dilihat wilayah mana saja yang memiliki rata-rata migrasi masuk tinggi (di atas rata-rata Jawa Tengah) dan rendah (di bawah rata-rata Jawa Tengah). Sebagian besar kabupaten/ kota di Jawa Tengah masuk dalam klasifikasi migrasi masuk rendah, yaitu sebesar 63%, sisanya masuk dalam kategori tinggi. Persebaran

kategori migrasi masuk tinggi (MMT) berada di lima blok (lihat Gambar 2), yaitu:

1. Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Tegal
2. Kota Semarang dan Kabupaten Kendal
3. Kabupaten Kudus, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Pati
4. Kabupaten Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri

Secara keseluruhan, klasifikasi rata-rata migrasi masuk di Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

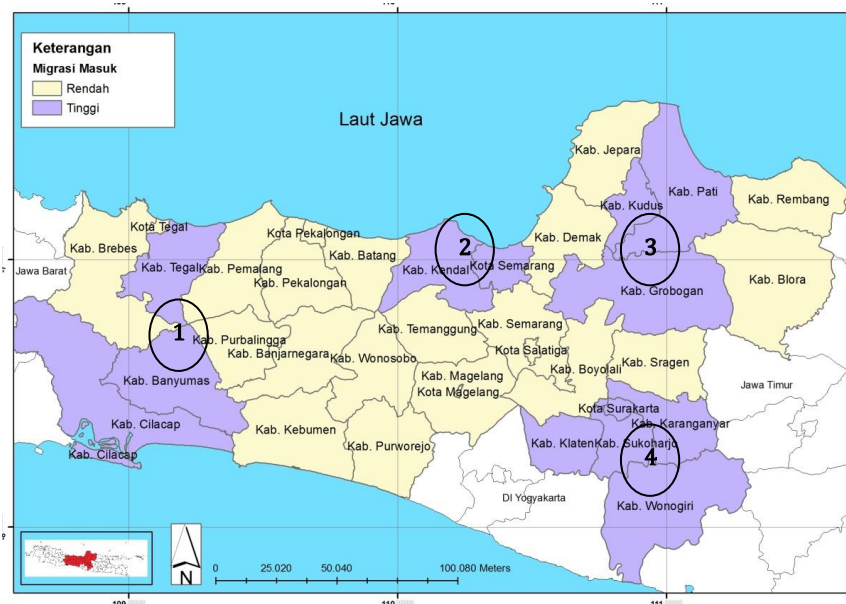
Tabel 1 Klasifikasi Rata-rata Migrasi Masuk di Jawa Tengah (2001-2011)

No.	Klasifikasi	Kabupaten/ Kota	Total Kabupaten/ Kota	Persentase
1.	Tinggi (>6978 jiwa)	Kota Semarang, Kab. Banyumas, Kab. Cilacap, Kab. Tegal, Kab. Kudus, Kab. Karanganyar, Kab. Wonogiri, Kab. Sukoharjo, Kab. Pati, Kota Surakarta, Kab. Klaten, Kab. Kendal dan Kab. Grobogan.	13	37%

No.	Klasifikasi	Kabupaten/ Kota	Total Kabupaten/ Kota	Persentase
2.	Rendah (<6978 jiwa)	Kab. Demak, Kab. Jepara, Kab. Pekalongan, Kab. Sragen, Kota Tegal, Kab. Magelang, Kab. Purworejo, Kab. Semarang, Kab. Boyolali, Kab. Rembang, Kota Salatiga, Kab. Banjarnegara, Kota Pekalongan, Kota Magelang, Kab. Wonosobo, Kab. Brebes, Kab. Pemalang, Kab. Kebumen, Kab. Blora, Kab. Purbalingga, Kab. Temanggung dan Kab. Batang.	22	63%

Sumber: Hasil Olah Data BPS, 2014

Catatan: Tinggi: di atas rata-rata Jawa Tengah Rendah: di bawah rata-rata Jawa Tengah



Sumber: Tim Peneliti, 2014

Gambar 2 Peta Klasifikasi Rata-rata Migrasi Masuk di Jawa Tengah

Klasifikasi Rata-rata Migrasi Keluar di Jawa Tengah

Migrasi keluar merupakan perpindahan penduduk dari wilayah asal ke wilayah tujuan yang disebabkan adanya faktor pendorong (*push factor*) antara lain semakin berkurangnya sumber-sumber kehidupan, seperti menurunnya daya dukung lingkungan dan menurunnya permintaan atas barang-barang tertentu yang bahan bakunya makin susah diperoleh, disamping itu juga keterbatasan

lapangan pekerjaan (Adioetomo dan Samosir, 2011).

Data BPS Jawa Tengah Tahun 2001-2011 menunjukkan bahwa rata-rata migrasi keluar di Jawa Tengah sebesar 6533 jiwa, selisih 6,8% dari rata-rata migrasi masuk di Jawa Tengah. Nilai rata-rata migrasi keluar total Jawa Tengah ini akan digunakan sebagai acuan untuk menentukan klasifikasi kota/kabupaten tersebut.

Tabel 2 Klasifikasi Rata-rata Migrasi Keluar di Jawa Tengah (2001-2011)

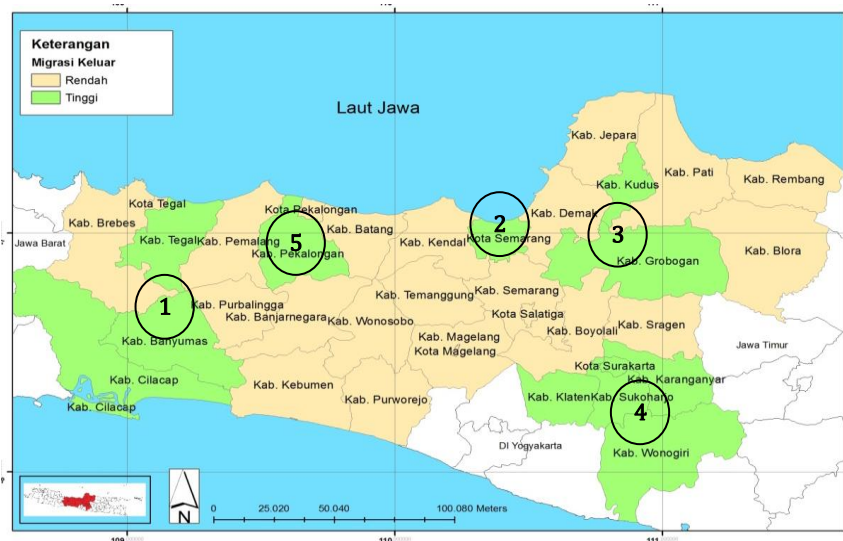
No.	Klasifikasi	Kabupaten/ Kota	Total Kabupaten/ Kota	Persentase
1.	Tinggi (>6533jiwa)	Kab. Cilacap, Kota Semarang, Kab. Kudus, Kab. Banyumas, Kab. Wonogiri, Kab. Klaten, Kab. Tegal, Kab. Grobogan, Kab. Sukoharjo, Kota Surakarta, Kab. Karanganyar dan Kab. Pekalongan.	12	34%
2.	Rendah (<6533jiwa)	Kab. Pati, Kab. Kendal, Kab. Sragen, Kab. Demak, Kab. Jepara, Kab. Boyolali, Kab. Semarang, Kota Tegal, Kab. Rembang, Kota Pekalongan, Kab. Purworejo, Kab. Wonosobo, Kab. Brebes, Kab. Kebumen, Kota Magelang, Kab. Banjarnegara, Kab. Magelang, Kota Salatiga, Kab. Pemalang, Kab. Blora, Kab. Batang, Kab. Purbalingga dan Kab. Temanggung.	23	66%

Sumber: Hasil Olah Data BPS , 2014

Catatan: Tinggi: di atas rata-rata Jawa Tengah Rendah: di bawah rata-rata Jawa Tengah

Berdasarkan data rata-rata migrasi keluar kota/kabupaten di Jawa Tengah, sebagian besar masuk dalam klasifikasi rendah yaitu sebanyak 66% dan sisanya 34% masuk klasifikasi migrasi keluar tinggi. Proporsi ini hampir sama dengan klasifikasi rata-rata migrasi masuk, namun komposisi kabupaten/ kota yang berada didalamnya sebagian berbeda. Artinya ada yang kabupaten/ kota yang memiliki tingkat migrasi masuk tinggi dan migrasi

keluar tinggi atau sebaliknya. Pada blok 1 dan 4 dimana migrasi masuk tinggi juga memiliki kecenderungan migrasi keluar tinggi, namun pada blok 2 hanya Kota Semarang yang memiliki migrasi keluar tinggi. Pada migrasi keluar tinggi ini, Kabupaten Pati tidak masuk dalam blok 3 dan bertambah satu blok (Blok 5) yang hanya meliputi satu wilayah yaitu Kabupaten Pekalongan.



Sumber: Tim Peneliti, 2014

Gambar 3 Peta Klasifikasi Rata-rata Jumlah Migrasi Keluar di Jawa Tengah

Tipologi Rata-Rata Migrasi Masuk dan Migrasi Keluar di Jawa Tengah

Hasil dari pembahasannya sebelumnya mengenai klasifikasi migrasi masuk dan migrasi keluar akan dilakukan overlay yang menghasilkan tipologi dalam empat kuadran, yaitu:

- Kuadran I: migrasi masuk tinggi-migrasi keluar tinggi (MMT-MKT)

- Kuadran II: migrasi masuk rendah-migrasi keluar tinggi (MMT-MKT)
- Kuadran III: migrasi masuk rendah-migrasi keluar rendah (MMR-MKR)
- Kuadran IV: migrasi masuk tinggi-migrasi keluar rendah (MMT-MKR)

Berikut adalah kuadran tipologi migrasi masuk dan keluar kota/ kabupaten di Jawa Tengah:

Tabel 3 Tipologi Migrasi Masuk dan Keluar di Jawa Tengah

		MK	
		<u>Kuadran II</u> <u>MMR MKT</u> 3% 1. Kab. Pekalongan	<u>Kuadran I</u> <u>MMT MKT</u> 31% 1. Kota Semarang 7. Kab. Wonogiri 2. Kab. Banyumas 8. Kab. Sukoharjo 3. Kab. Cilacap 9. Kota Surakarta 4. Kab. Tegal 10. Kab. Klaten 5. Kab. Kudus 11. Kab. Grobogan 6. Kab. Karanganyar
		<u>Kuadran III</u> <u>MMR MKR</u> 60% 1. Kab. Demak 12. Kota Pekalongan 2. Kab. Jepara 13. Kota Magelang 3. Kab. Sragen 14. Kab. Wonosobo 4. Kota Tegal 15. kab. Brebes 5. Kab. Magelang 16. Kab. Pemalang 6. Kab. Purworejo 17. Kab. Kebumen 7. Kab. Semarang 18. Kab. Blora 8. Kab. Boyolali 19. Kab. Purbalingga 9. Kab. Rembang 20. Kab. Temanggung 10. Kota Salatiga 21. Kab. Batang 11. Kab. Banjarnegara	<u>Kuadran IV</u> <u>MMT MKR</u> 6% 1. Kab. Pati 2. Kab. Kendal
		MM	

Sumber: Tim Peneliti, 2014

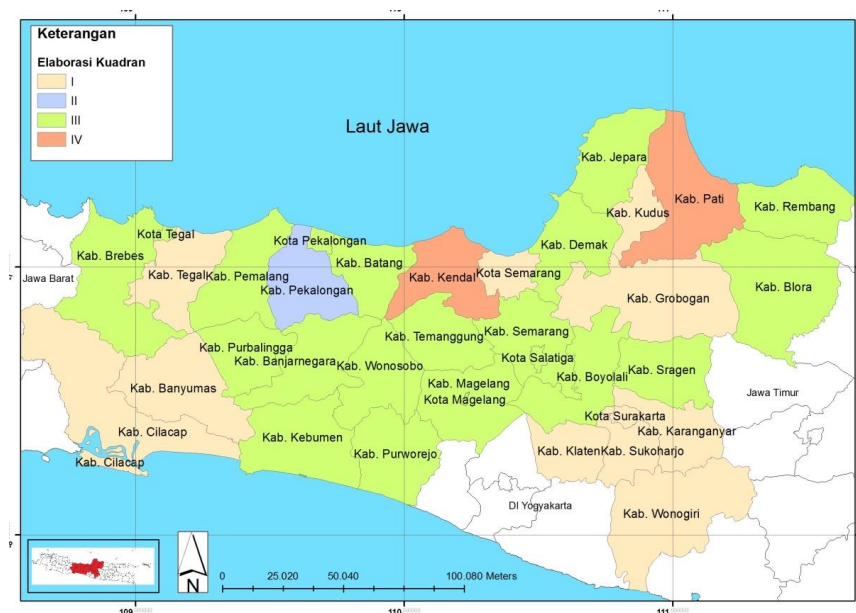
Sebagian besar kabupaten/ kota di Jawa Tengah termasuk dalam kuadran III yaitu sebanyak 21 kabupaten/ kota (60%) dan pada kuadran I sebanyak 11 kabupaten/kota (31%). Sedangkan yang termasuk kategori kuadran II hanya 1 kabupaten, yaitu Kabupaten Pekalongan dan pada kuadran IV hanya dua kabupaten, yaitu Pati dan Kendal. Kota

Semarang sebagai ibukota Jawa Tengah merupakan bagian dari kuadran I yang memiliki jumlah migrasi masuk tinggi dan migrasi keluar juga tinggi. Tingginya migrasi ini tidak terlepas dari banyaknya pelayanan publik dan kesempatan kerja di pusat ibu kota, misalnya kebutuhan akan pendidikan tinggi, bekerja, keberadaan mall/ swalayan dan lain-lain.

Hal menarik terjadi pada kuadran I, dimana migrasi masuk tinggi dan keluar juga tinggi, tipikal masyarakat yang masuk bisa jadi berbeda dengan yang keluar. Masyarakat yang masuk kecenderungan menginginkan perbaikan baik dari sisi pelayanan publik maupun finansial (pemenuhan kebutuhan dengan lapangan pekerjaan yang berada di perkotaan), namun untuk masyarakat yang keluar

cenderung memiliki harapan yang lebih tinggi dari sekedar apa yang tersedia di wilayahnya.

Keterkaitan antara tingginya migrasi dengan perekonomian akan menjadi bahasan di akhir kajian ini, sehingga bisa diketahui apakah tingginya migrasi terkait dengan tingginya ekonomi pada sektor primer, sekunder atau tersier.



Sumber: Tim Peneliti, 2014

Gambar 4 Peta Tipologi Migrasi Masuk dan Keluar di Jawa Tengah

Klasifikasi Nilai PDRB Sektor Primer di Jawa Tengah

Sektor primer merupakan sektor yang terdiri atas sektor pertanian dan pertambangan-penggalan. Tingginya nilai pada sektor ini menggambarkan kondisi

wilayah dengan karakter pedesaan (*rural*). Pada Provinsi Jawa Tengah, terdapat 43% kabupaten yang memiliki nilai sektor primer di atas rata-rata Jawa Tengah. Nama-nama kota/ kabupaten tersebut dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4 Klasifikasi Nilai PDRB Sektor Primer di Jawa Tengah

No.	Klasifikasi	Kabupaten/ Kota	Total Kabupaten/ Kota	Persentase
1.	Tinggi (>908.579.760.000)	Kab. Cilacap, Kab. Brebes, Kab. Demak, Kab. Pati, Kab. Wonogiri, Kab. Kendal, Kab. Grobogan, Kab. Magelang, Kab. Blora, Kab. Banjarnegara, Kab. Rembang, Kab. Kebumen, Kab. Purworejo, Kab. Karanganyar, Kab. Klaten.	15	43%

No.	Klasifikasi	Kabupaten/ Kota	Total Kabupaten/ Kota	Persentase
2.	Rendah (<908.579.760.000)	Kab. Sragen, Kab. Banyumas, Kab. Sukoharjo, Kab. Pemasang, Kab. Wonosobo, Kab. Boyolali, Kab. Purbalingga, Kab. Temanggung, Kab. Tegal, Kab. Semarang, Kab. Pekalongan, Kab. Jepara, Kab. Batang, Kab. Kudus, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Salatiga, Kota Magelang dan Kota Surakarta.	20	57%

Sumber: Tim Peneliti, 2014

Catatan: Tinggi: di atas rata-rata Jawa Tengah

Rendah: di bawah rata-rata Jawa Tengah



Sumber: Tim Peneliti, 2014

Gambar 5 Peta Klasifikasi Nilai PDRB Sektor Primer di Jawa Tengah

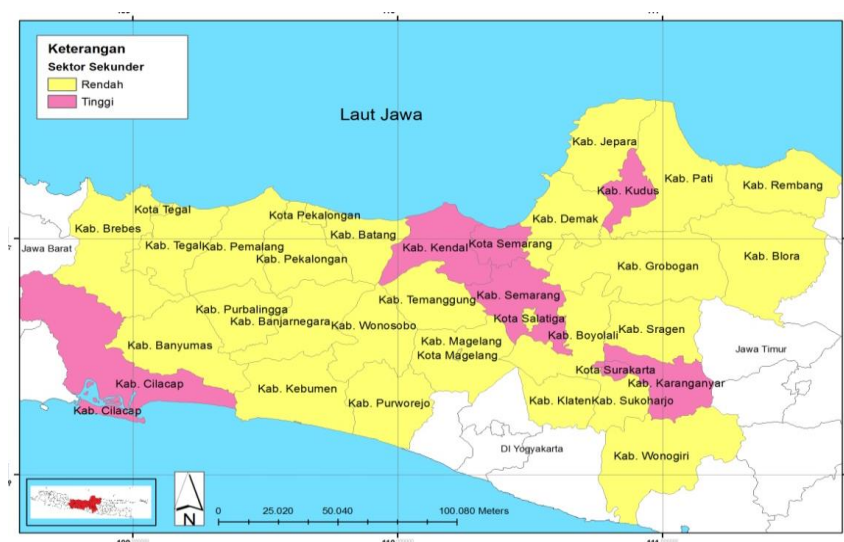
Klasifikasi Nilai PDRB Sektor Sekunder di Jawa Tengah

Sektor sekunder merupakan sektor yang terdiri atas sektor industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih serta bangunan. Tingginya nilai pada sektor ini menggambarkan kondisi wilayah dengan

karakter ke arah perkotaan. Pada provinsi Jawa Tengah, terdapat 20% kabupaten yang memiliki nilai sektor sekunder di atas rata-rata Jawa Tengah. Nama-nama kabupaten tersebut dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini:

No.	Klasifikasi	Kabupaten/ Kota	Total Kabupaten/ Kota	Persentase
1.	Tinggi (>1.588.355.470.000)	Kab. Cilacap, Kota Semarang, Kab. Kudus, Kab. Karanganyar, Kab. Semarang, Kab. Kendal dan Kota Surakarta.	7	20%
2.	Rendah (<1.588.355.470.000)	Kab. Sukoharjo, Kab. Pemalang, Kab. Jepara, Kab. Klaten, Kab. Pati, Kab. Magelang, Kab. Tegal, Kab. Pekalongan, Kab. Banyumas, Kab. Batang, Kab. Sragen, Kab. Brebes, Kota Pekalongan, Kab. Boyolali, Kab. Temanggung, Kab. Demak, Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara, Kab. Kebumen, Kota Tegal, Kab. Purworejo, Kab. Wonosobo, Kab. Grobogan, Kab. Rembang, Kota Salatiga, Kab. Wonogiri, Kota Magelang dan Kab. Blora	28	80%

Catatan: Tinggi: di atas rata-rata Jawa Tengah Rendah: di bawah rata-rata Jawa Tengah



Gambar 6 Peta Klasifikasi Nilai PDRB Sektor Sekunder di Jawa Tengah

Sektor tersier merupakan sektor yang terdiri atas sektor perdagangan, restoran dan hotel; pengangkutan dan komunikasi; keuangan dan persewaan serta jasa-jasa. Tingginya nilai pada sektor ini menggambarkan kondisi wilayah

Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, Volume 13 Nomor 1 – Juni 2015

Tabel 6 Klasifikasi Nilai PDRB Sektor Tersier di Jawa Tengah

No.	Klasifikasi	Kabupaten/ Kota	Total Kabupaten/ Kota	Persentase
1.	Tinggi (>1.706.840.540.000)	Kota Semarang, Kab. Cilacap, Kab. Kudus, Kab. Sukoharjo, Kota Surakarta, Kab. Klaten, Kab. Banyumas dan Kab. Semarang.	8	23%
2.	Rendah (<1.706.840.540.000)	Kab. Boyolali, Kab. Jepara, Kab. Pati, Kab. Kendal, Kab. Kebumen, Kab. Grobogan, Kab. Magelang, Kab. Tegal, Kab. Pekalongan, Kab. Purworejo, Kab. Pemalang, kab. Brebes, Kab. Karanganyar, Kab. Demak, Kab. Purbalingga, Kab. Wonogiri, Kota Pekalongan, Kab. Banjarnegara, Kab. Sragen, Kab. Temanggung, Kab. Batang, Kota Magelang, Kab. Rembang, Kab. Blora, Kab. Wonosobo, Kota Tegal dan Kota Salatiga.	27	77%

Sumber: Tim Peneliti, 2014

Catatan: Tinggi: di atas rata-rata Jawa Tengah Rendah: di bawah rata-rata Jawa Tengah



Sumber: Tim Peneliti., 2014

Gambar 7 Peta Klasifikasi Nilai PDRB Sektor Tersier di Jawa Tengah

Keterkaitan Migrasi dan Perekonomian di Jawa Tengah

Keterkaitan ini dilakukan dengan mengelaborasi antara jumlah migrasi baik

masuk maupun keluar dengan PDRB per sektor. Adapun tujuannya yaitu untuk melihat sektor perekonomian mana yang lebih mendorong terjadinya migrasi masuk

dan keluar lebih besar. Mantra (1991) berpendapat bahwa motivasi utama orang melakukan perpindahan dari daerah asal (pedesaan) ke daerah tujuan (perkotaan) adalah motif ekonomi. Motif tersebut berkembang karena adanya ketimpangan ekonomi antardaerah. Hal senada juga diungkapkan Haris (2002), bahwa perbedaan pendapatan antardaerah merupakan salah satu alasan paling rasional untuk menjelaskan terjadinya aktivitas migrasi dan hal ini berkaitan dengan pengelolaan potensi wilayah yang dimiliki oleh suatu wilayah tertentu. Potensi tersebut menyangkut potensi pasar, produksi, ketersediaan sumberdaya.

Tingginya migrasi masuk mengindikasikan bahwa wilayah tersebut memiliki potensi ekonomi yang cukup signifikan, sehingga potensi tersebut mampu mendorong sebagian migran untuk melakukan proses perpindahan. Konsep ekonomi menjadi salah satu pendorong terjadinya perpindahan dikuatkan oleh Todaro dan Smith (2006), yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi dari daerah pedesaan ke perkotaan disebabkan adanya perbedaan upah riil yang diharapkan dan kemungkinan keberhasilan memperoleh pekerjaan pada sektor modern di daerah perkotaan.

Kondisi seperti ini juga terjadi pada kuadran I, terutama di Kota Semarang, Kota Surakarta dan Kabupaten Kudus. Faktor penarik tingginya migrasi masuk cenderung karena perkembangan sektor sekunder dan tersier, dengan kata lain sektor perkotaan berperan besar terhadap tingginya migrasi yang masuk. Ketiga kota/ kabupaten tersebut ditunjang dengan kelengkapan sarana prasarana dan luasnya kesempatan untuk mendapat pekerjaan. Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah dimana pusat segala aktivitas tingkat provinsi berada di kota ini. Sedangkan Kota Surakarta merupakan kota dengan kemajuan pada perdagangan

dan jasa, juga sebagai pusat batik dan kebudayaan. Walaupun migrasi masuk tinggi, pada kuadran I juga memperlihatkan bahwa migrasi yang keluar juga tinggi. Salah satu faktor pendorongnya adalah perkembangan ekonomi yang cenderung lambat, mengakibatkan iklim usaha kurang kompetitif. Sehingga masyarakat pun kurang puas terhadap apa yang dihasilkan kota-kota besar di Jawa Tengah dan mereka berusaha untuk mencari kehidupan yang lebih baik lagi. Anomali pada kuadran I terjadi pada Kabupaten Tegal, dimana kondisi sektor primer, sekunder dan tersier rendah, namun tingkat migrasi masuk justru tinggi.

Kabupaten Cilacap, Karanganyar, Klaten, Grobogan dan Wonogiri justru di dorong sektor primer yang lebih unggul. Wilayah-wilayah ini memiliki potensi SDA yang bisa dimanfaatkan seperti PLTU di Cilacap sehingga mendorong orang untuk bekerja dan menetap di sana. Sementara masyarakat yang keluar dari daerah tersebut ada yang kecenderungan hanya sekedar “boro” (menetap sementara) di daerah tujuan dan kembali ke daerahnya.

Pada kuadran II memperlihatkan bahwa faktor pendorong terjadinya migrasi keluar tinggi adalah karena kondisi perekonomian perkotaan rendah, hal ini dilihat dari nilai sektor sekunder dan tersier yang cenderung di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Sehingga masyarakat cenderung melakukan migrasi keluar karena faktor pemenuhan kebutuhan dengan mencari pekerjaan yang lebih baik. Kuadran III yang mencerminkan migrasi masuk rendah dan migrasi keluar rendah lebih disebabkan karena kondisi ekonomi yang mengarah pada sektor primer tinggi, sedangkan sektor sekunder dan tersier rendah. Artinya sektor yang berkembang merupakan sektor perdesaan, sehingga kurang mendorong terjadinya migrasi masuk. Selain itu, mereka tidak

melakukan migrasi keluar dalam waktu lama, karena mereka melakukan pergerakan ulang alik (*commuter*) baik bekerja atau bersekolah. Sementara pada kuadran IV yang mencerminkan migrasi masuk tinggi dan migrasi keluar rendah bukan didorong karena kondisi sektor sekunder dan tersier,

namun kondisi ekonomi perdesaannya memiliki kecenderungan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Pati dan Kabupaten Kendal. Keterkaitan tipologi dan kondisi perekonomian di Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 7 di bawah ini:

Tabel 7 Elaborasi Tipologi Migrasi dengan Perekonomian di Jawa Tengah

No.	Kuadran	Kabupaten/Kota	Tipologi	Sektor Pendorong
1	I	Kota Semarang	MMT-MKT	sektor sekunder dan tersier tinggi
2		Kota Surakarta	MMT-MKT	sektor sekunder dan tersier tinggi
3		Kab. Kudus	MMT-MKT	sektor sekunder dan tersier tinggi
4		Kab. Sukoharjo	MMT-MKT	sektor tersier tinggi
5		Kab. Banyumas	MMT-MKT	sektor tersier tinggi
6		Kab. Cilacap	MMT-MKT	sektor primer, sekunder dan tersier tinggi
7		Kab. Karanganyar	MMT-MKT	sektor primer dan sekunder tinggi
8		Kab. Klaten	MMT-MKT	sektor primer dan tersier tinggi
9		Kab. Grobogan	MMT-MKT	sektor primer tinggi
10		Kab. Wonogiri	MMT-MKT	sektor primer tinggi
11		Kab. Tegal	MMT-MKT	sektor primer, sekunder dan tersier rendah
12	II	Kab. Pekalongan	MMR-MKT	sektor primer, sekunder dan tersier rendah
13	III	Kab. Demak	MMR-MKR	sektor primer tinggi
17		Kab. Magelang	MMR-MKR	sektor primer tinggi
18		Kab. Purworejo	MMR-MKR	sektor primer tinggi
21		Kab. Rembang	MMR-MKR	sektor primer tinggi
23		Kab. Banjarnegara	MMR-MKR	sektor primer tinggi
27		kab. Brebes	MMR-MKR	sektor primer tinggi
29		Kab. Kebumen	MMR-MKR	sektor primer tinggi
30		Kab. Blora	MMR-MKR	sektor primer tinggi
14		Kab. Jepara	MMR-MKR	sektor primer, sekunder dan tersier rendah
15		Kab. Sragen	MMR-MKR	sektor primer, sekunder dan tersier rendah
16		Kota Tegal	MMR-MKR	sektor primer, sekunder dan tersier rendah
20		Kab. Boyolali	MMR-MKR	sektor primer, sekunder dan tersier rendah
22		Kota Salatiga	MMR-MKR	sektor primer, sekunder dan tersier rendah
24		Kota Pekalongan	MMR-MKR	sektor primer, sekunder dan tersier rendah
25		Kota Magelang	MMR-MKR	sektor primer, sekunder dan tersier rendah
26		Kab. Wonosobo	MMR-MKR	sektor primer, sekunder dan tersier rendah
28		Kab. Pemasang	MMR-MKR	sektor primer, sekunder dan tersier rendah
31		Kab. Purbalingga	MMR-MKR	sektor primer, sekunder dan tersier rendah
32		Kab. Temanggung	MMR-MKR	sektor primer, sekunder dan tersier rendah
33		Kab. Batang	MMR-MKR	sektor primer, sekunder dan tersier rendah
19		Kab. Semarang	MMR-MKR	sektor sekunder dan tersier tinggi
34	IV	Kab. Pati	MMT-MKR	sektor primer tinggi
35		Kab. Kendal	MMT-MKR	sektor primer dan sekunder tinggi

Sumber: Tim Peneliti, 2014

Keterangan:

MMT: migrasi masuk tinggi

MKT: migrasi keluar tinggi

MMR: migrasi masuk rendah

MKR: migrasi masuk rendah

Salah satu contoh studi yang pernah dilakukan adalah migrasi di Kabupaten Wonogiri (Purnomo, 2009), fenomena yang terlihat adalah masyarakat yang melakukan migrasi lebih banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan perantau dari daerah Wonogiri masih sangat rendah karena didominasi pendidikan SD (50,2%) dan mereka yang merantau banyak bekerja pada sektor informal misalkan pedagang bakso, pedagang jamu gendong dan buruh kasar dan mereka merantau untuk bekerja mendapatkan uang kemudian dibelanjakan di daerah asal untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya yang ada di Kabupaten Wonogiri. Untuk jenis tipologinya, Kabupaten Wonogiri termasuk dalam kuadran I yang mencerminkan Migrasi Masuk Tinggi-Migrasi Keluar Tinggi.

PENUTUP

Tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia saat ini masih tinggi, dengan persebaran dan pertumbuhan penduduk yang berbeda di setiap provinsi. Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi ketiga dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya jumlah penduduk tersebut adalah komponen migrasi. Terkait kajian migrasi yang telah dilakukan pada pembahasan ini hanya sebatas internal Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari kajian ini menunjukkan 11 kabupaten/ kota tergolong migrasi masuk dan keluar tinggi, 21 kabupaten/kota tergolong migrasi masuk dan keluar rendah, 1 kabupaten tergolong migrasi masuk rendah dan keluar tinggi, serta 2 kabupaten tergolong migrasi masuk tinggi dan keluar rendah.

Kecenderungan wilayah yang tergolong dalam kategori migrasi masuk dan keluar tinggi, orientasi masyarakat yang melakukan migrasi masuk dan keluar berbeda. Masyarakat yang masuk cenderung ingin memenuhi kebutuhan dan

memanfaatkan fasilitas yang terdapat di wilayah tersebut, sedangkan masyarakat yang keluar cenderung memiliki harapan yang lebih tinggi yang belum bisa diwujudkan di tempat wilayah tersebut. Keterkaitan migrasi penduduk dan perekonomian di Jawa Tengah yaitu bahwa sektor ekonomi yang menjadi penarik orang melakukan migrasi tidak hanya dari sektor perkotaan (sekunder dan tersier) saja, namun juga sektor primer (potensi alam) yang dimiliki wilayah bersangkutan.

Wilayah dengan kategori migrasi masuk dan keluar rendah dengan ekonomi yang kurang berkembang (sektor primer, sekunder dan tersier rendah) mengindikasikan bahwa wilayah tersebut cenderung stagnan, sehingga direkomendasikan bagi wilayah tersebut untuk mendorong perkembangan ekonomi yang ada. Rekomendasi selanjutnya ditujukan untuk pendataan. Kajian ini hanya berdasarkan data sekunder, dimana pencatatan data migrasi hanya berasal dari orang-orang yang melapor, walaupun tidak selalu mencerminkan kondisi di lapangan. Kendalanya adalah masih banyak masyarakat yang ketika melakukan perpindahan lebih dari 6 bulan tidak melaporkan diri di desa atau kecamatan bahkan pada level kabupaten (dinas kependudukan dan pencatatan sipil). Mereka hanya melaporkan diri ke RT, dan ketua RT ini tidak menindaklanjuti ke level yang lebih tinggi. Sehingga pengertian migrasi sebagai konteks yang dipahami masyarakat adalah orang yang berpindah secara identitas (KTP), padahal konteks menetap menurut BPS tidak hanya berdasarkan unsur KTP saja, tetapi juga lama tinggal minimal 6 bulan. Dengan demikian, perlu adanya pembaharuan sistem pendataan agar semua orang yang menetap di wilayah tersebut minimal 6 bulan juga terdaftar sebagai seorang migran, sehingga penelitian yang dihasilkan dari data sekunder mencerminkan kondisi faktual.

DAFTAR PUSTAKA

- Adioetomo, Sri Moertiningsih, dan Omas Bulan Samosir. 2011. *Dasar-dasar Demografi*. Jakarta: Salemba Empat
- Drakakis, David W. - Smith . 2000: *Third World Cities*. Edisi Kedua. London: Routledge
- Haris, Abdul. 2002. “Migrasi Internasional dan Pembangunan: Realitas Ekonomi-Politik yang Terabaikan” dalam Abdul Haris dan Nyoman Adika (eds), *Dinamika Kependudukan dan Pembangunan di Indonesia: dari Perspektif Makro ke Realitas Mikro*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI)
- Lee, Everett S. 1970. “A Theory of Migration”, in George J. Demko, Harrold M. Rose, and George A. Schnell (eds), *Population Geography: A Reader*. 228-298.
- Mantra, Ida Bagus. 1991. *Pengantar Studi Demografi*. Yogyakarta: Nur Cahaya
- Pacione, Michael. 2001. *Urban Geography: A Global Perspective*. London: Routledge
- Purnomo, Didit. 2009. *Fenomena Migrasi Tenaga Kerja dan Perannya Bagi Pembangunan Daerah Asal: Studi Empiris di Kabupaten Wonogiri*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 10, No.1, Juni 2009, hal. 84 – 102
- Sudibia, I Ketut. 2011. *Kecenderungan Pola dan Dampak Migrasi Penduduk di Provinsi Bali Periode 1980-2005*. Jurnal Piramida Vol.7, no. 2, Desember 2011.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. *Perkembangan Ekonomi Indonesia*. Edisi Kesembilan Jilid 1. Jakarta: Penerbit Erlangga

